

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.

1. Teori Keagenan

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Jensen dan Meckling (1976) dalam Arief dan Agus (2007) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Biaya agensi adalah biaya yang dikeluarkan untuk memastikan bahwa agen dan manajer bertindak untuk kepentingan terbaik prinsipal.

Corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi investor, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri atau menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan

berkaitan dengan bagaimana para investor mengendalikan para manajer (Sheifer dan Vishny, 1997 dalam Herawaty, 2006).

2. *Corporate Governance*

Corporate Governance terdiri dari dua kata, yaitu *corporate* dan *governance*. Kata *corporate* merupakan kata sifat (*adjective*) yang bermakna “berbagai sifat yang berkaitan dengan korporasi atau perusahaan”. Kata *governance* merupakan kata benda (*noun*) yang bermakna “pengelolaan”. Di Indonesia, sebagian literatur menerjemahkan *corporate governance* sebagai tata kelola. (Warsono dkk., 2009 dalam Natalia, 2012).

Corporate governance merupakan seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ektern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. (Himkmah, 2011)

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mengeluarkan asas-asas dalam pedoman umum *good corporate governance* Indonesia tahun 2006 yang dijabarkan sebagai berikut:

a. *Transparansi (Transparency)*

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang

untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat memertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memerhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

c. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

d. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan

3. Luas Pengungkapan *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan

Laporan tahunan berisi pengungkapan informasi yang dapat membantu *stakeholders* dalam pengambilan keputusan. Informasi yang diungkapkan tidak hanya berupa informasi keuangan saja, tetapi juga laporan non keuangan. Selain digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, pengungkapan dalam laporan tahunan juga digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas manajemen atas kinerja pengelolaan perusahaan kepada para investor sebagai pemilik (Warsono dkk., 2009 dalam Natalia, 2012).

Laporan tahunan merupakan sumber utama dalam melakukan penelitian mengenai pengungkapan *corporate governance* karena laporan tahunan berisi tentang berbagai macam informasi mengenai perusahaan termasuk praktik *good corporate governance* (Rini, 2010 dalam Hikmah dkk., 2011). Pengungkapan *corporate governance* pada laporan tahunan tidak terbatas pada pengungkapan yang diwajibkan oleh pemerintah sehingga pengungkapan di luar persyaratan minimal dianggap sebagai pengungkapan sukarela (Hikmah dkk., 2011).

Dalam penelitian ini, *item* pengungkapan yang digunakan berasal dari pengungkapan wajib yang diatur dalam Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-134/BL/2006 Peraturan Nomor X.K.6 dan yang diperoleh dari Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (KNKG, 2006 dalam Hikmah., 2011) seperti pada penelitian (Rini, 2010

dari PBI-2006, Pedoman Umum *Good Corporate Governance* manufaktur Indonesia dari KNKCG tahun 2004, dan *Enhancing Corporate Governance for Banking Organization* dari *Basel Committee* tahun 2006 karena sektor yang diteliti kali ini adalah lebih khusus yaitu sektor manufaktur.

Berdasarkan peraturan dan pedoman tersebut, diperoleh sebanyak 16 indikator pengungkapan yang terdiri dari pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, komite nominasi dan remunerasi, komite manajemen risiko, komite-komite lain yang dimiliki perusahaan, sekretaris perusahaan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal, manajemen risiko perusahaan, perkara penting yang dihadapi oleh perusahaan, anggota dewan direksi, dan anggota dewan komisaris, akses informasi dan data perusahaan, etika perusahaan, kegiatan sosial dan politik, pernyataan penerapan *good corporate governance*, dan informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan *good corporate governance*. Enam belas indikator tersebut memuat *item* pengungkapan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu perusahaan telah mengungkapkan informasi mengenai *corporate governance* (Hikmah dkk., 2011).

4. Ukuran Perusahaan

Perusahaan besar mungkin akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak sebagai upaya untuk mengurangi biaya keagenan. Kedua, perusahaan besar menghadapi biaya politis yang lebih besar dari pada perusahaan kecil. Perusahaan besar merupakan entitas yang banyak disorot

informasi merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk mewujudkan akuntabilitas publik. Terakhir, perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar. Dengan sumber daya yang besar tersebut perusahaan perlu dan mampu membiayai penyediaan informasi untuk kepentingan internal (Timur, 2012).

Sebaliknya, perusahaan dengan sumber daya yang kecil mungkin tidak memiliki cukup banyak informasi sehingga perlu ada tambahan biaya yang relatif besar untuk dapat melakukan pengungkapan selengkap yang dilakukan oleh perusahaan besar. (Timur, 2012)

5. Umur *Listing* Perusahaan

Umur perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan dapat tetap bertahan atau eksis, mampu bersaing, dan memanfaatkan peluang bisnis dalam suatu perekonomian. Perusahaan yang memiliki umur lebih tua mungkin akan meningkatkan praktik pengungkapan dari waktu ke waktu. Hal ini dikarenakan perusahaan yang lebih tua dianggap telah memiliki lebih banyak pengalaman dalam pengungkapan laporan tahunannya. Perusahaan yang telah memiliki pengalaman lebih banyak akan lebih memahami kebutuhan penggunanya dan informasi yang lebih detail mengenai perusahaan yang harus dibuka kepada pihak-pihak di luar manajemen yang

6. Profitabilitas

Amilia (2007) menyatakan bahwa rasio profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka akan sangat diperlukan pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan.

7. Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance* (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006). Akan tetapi, dewan komisaris tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam mengambil keputusan operasional. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan manajemen dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif (Hikmah dkk., 2011)

8. Komite Audit

Berdasarkan Pedoman *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006 tugas komite audit adalah membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal perusahaan dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku dan

memiliki keterbatasan dalam sistem informasi pelaporan. Perusahaan besar memiliki insentif untuk menyajikan pengungkapan *corporate governance*, karena perusahaan besar dihadapkan pada biaya dan tekanan politik yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan kecil cenderung untuk menyembunyikan informasi penting dikarenakan *competitive disadvantage*. Sehingga ukuran suatu perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan.

Penelitian yang meneliti ukuran perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance* menemukan mempunyai pengaruh yang positif Hikmah dkk. (2011) dan Rini (2010) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Dengan demikian, hipotesis yang dapat diturunkan adalah sebagai berikut:

H₁: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

2. Pengaruh umur *listing* perusahaan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Menurut Yularto dan Chariri (2003) dalam Rini (2010) umur perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan dapat tetap bertahan atau eksis, mampu bersaing, dan memanfaatkan peluang bisnis dalam suatu perekonomian. Perusahaan yang memiliki umur lebih tua mungkin akan meningkatkan praktik pengungkapan dari waktu ke waktu. Hal ini

dikarenakan perusahaan yang lebih tua dianggap telah memiliki lebih banyak pengalaman dalam pengungkapan laporan tahunannya. Perusahaan yang telah memiliki pengalaman lebih banyak akan lebih memahami kebutuhan penggunanya dan informasi yang lebih detail mengenai perusahaan yang harus dibuka kepada pihak-pihak di luar manajemen yang berkepentingan terhadap perusahaan. Semakin lama umur perusahaan akan lebih berpengalaman dalam pengungkapan dan lebih memahami kebutuhan pengguna informasi sehingga akan melakukan pengungkapan yang lebih luas

Yularto dan Chariri (2003) dalam Hikmah dkk. (2011) berpendapat bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan. Perusahaan yang sudah berdiri lebih lama diasumsikan telah memiliki banyak *stakeholders*. Hal ini menyebabkan perusahaan mengungkapkan informasi seluas-luasnya sebagai wujud dari tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholders*. Di sisi lain, *stakeholders* juga menuntut perusahaan untuk mengungkapkan informasi secara detail agar dapat digunakan untuk mengetahui kondisi perusahaan sebenarnya.

Hasil penelitian Hikmah dkk. (2011) dan Kusumawati (2006) menunjukkan bahwa umur *listing* terdapat berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Dengan demikian, hipotesis yang dapat diturunkan adalah sebagai berikut:

H₁ : Umur *listing* perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan

3. Pengaruh profitabilitas terhadap luas pengungkapan *corporate governance*

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada. Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur menggunakan rasio *return on equity* (ROE). Pemilihan rasio ini berdasarkan argumen bahwa adanya *corporate governance* dimaksudkan terutama untuk kepentingan pemegang saham (Jackson dan Carter, 2005 dalam Kusumawati, 2006).

Profit margin & earning return sebagai variabel yang berhubungan secara positif dalam variasi yang ditentukan dalam luas pengungkapan perusahaan dengan alasan laba yang lebih tinggi memotivasi manajemen untuk menyajikan informasi yang lebih luas. Manajer ingin meyakinkan kepada pemilik atau investor tentang profitabilitas yang dicapai perusahaan agar mereka meningkatkan kompensasi untuk manajemen, untuk itu pihak manajemen melakukan pengungkapan yang lebih luas (Haryanto, 2007 dalam Hikmah dkk., 2011).

Meningkatnya profitabilitas suatu perusahaan dapat disebabkan oleh meningkatnya kapasitas perusahaan atau sumber pendanaan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Meningkatnya kapasitas perusahaan atau sumber pendanaan ditandai dengan meningkatnya jumlah dan ragam pemangku kepentingan yang mempercayakan sebagian hartanya untuk disertakan dalam modal perusahaan. Bertambahnya sumber pendanaan ini

mengembangkan aktivitas perusahaan sehingga profitabilitas perusahaan akan cenderung naik (Zulaikha, 2012).

Pada praktiknya, peningkatan jumlah dan ragam pemangku harus disertai dengan pengungkapan informasi, khususnya informasi mengenai *corporate governance* sebagai respon tanggung jawab atas penggunaan dana pemangku kepentingan oleh perusahaan. Dengan laporan informasi *corporate governance* yang memiliki kualitas yang tinggi, maka pemangku kepentingan akan semakin yakin dengan cara yang ditempuh oleh manajemen. Cara-cara yang dimaksud adalah cara-cara yang memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*), tidak hanya berdasarkan kepentingan perusahaan saja. Dengan demikian, kenaikan profitabilitas akan menyebabkan kecenderungan kenaikan tingkat pengungkapan laporan informasi *Corporate Governance* (Zulaikha, 2012).

Hasil penelitian Kusumawati (2006) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Dengan demikian, hipotesis yang dapat diturunkan adalah sebagai berikut:

H₃: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

4. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap luas pengungkapan *corporate governance*

Dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan

memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara. Tugas komisaris utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris (KNKG, 2006 dalam Hikmah dkk., 2011).

Coller dan Gregory dalam Sembiring (2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan dan mengawasi kinerja manajer secara efektif. Oleh karena itu, pengungkapan yang dilakukan oleh manajemen juga akan semakin luas. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Arifin dalam Sembiring (2005) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan.

Hasil penelitian Hikmah dkk. (2011) dan Rahayu (2008) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris terdapat berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Dengan demikian, hipotesis yang dapat diturunkan adalah sebagai berikut:

H₄: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

5. Pengaruh komite audit terhadap luas pengungkapan *corporate governance*

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang

dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan

pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelola perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Berdasarkan surat edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite audit ini yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite audit yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independensi (Anggriana, 2011).

Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern. Tujuan pembentukan komite audit (KNKG, 2006) adalah memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum, memastikan bahwa internal kontrolnya memadai, menindaklanjuti terhadap dugaan adanya penyimpangan yang material di bidang keuangan dan implikasi hukumnya dan merekomendasikan seleksi auditor eksternal. Salah satu cara komisaris mempertahankan independensinya adalah dengan membentuk komite audit.

Salah satu cara komisaris mempertahankan independensinya adalah dengan membentuk komite

audit dalam perusahaan berpengaruh terhadap kualitas dan integritas laporan keuangan yang dihasilkan (Wawo, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Yuen dkk. (2009) dalam Zulaikha, (2012) menyatakan bahwa komite audit merupakan salah satu mekanisme kontrol atas organ perusahaan yang sangat penting dalam meningkatkan transparansi perusahaan dan mendorong manajemen agar mengungkapkan lebih banyak informasi. Keefektifan fungsi komite audit dalam bekerja dapat melindungi kepentingan dari *stakeholder* yang menginginkan pengungkapan yang transparansi, jujur, dan profesional. Selain itu, kinerja komite audit yang baik dapat menambah nilai bagi *principal* yang menginginkan keselarasan kepentingan dengan *agent* (manajer perusahaan) sebagai pelaksana bisnis perusahaan.

Berdasarkan pedoman *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006 tugas komite audit adalah membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (Wawo, 2010).

Hasil penelitian Zulaikha (2012) dan Kusumawati (2006)

pengungkapan *corporate governance*. Dengan demikian, hipotesis yang dapat diturunkan adalah sebagai berikut:

.....

C. MODEL PENELITIAN

Model penelitian ini menggambarkan pengaruh ukuran perusahaan, umur *listing*, *profitabilitas*, ukuran dewan komisaris dan komite audit terhadap luas pengungkapan *corporate governance*, dengan bentuk model sebagai berikut:

